

SKRIPSI
PENGEMBANGAN KAPASITAS
(STUDI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI DESA POLEONRO
KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE)

ASNAL SUDIRMAN

E211 15 517



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Asnal Sudirman (E211 15 517), Pengembangan Kapasitas (Studi Program Kampung Iklim di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. 114 halaman + 7 Gambar + 6 Tabel + 31 Pustaka + 3 Lampiran. Dibimbing oleh Dr. Nurdin Nara, M.Si dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Kapasitas dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat deskriptif. Fokus penelitiannya berdasarkan pada 3 variabel pengembangan kapasitas menurut Merilee S. Grindle (1997) yaitu Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penguatan Organisasi dan Reformasi Kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Kapasitas sebagai sebuah strategi menjadikan Kelompok Kerja Program Kampung iklim (Pokja ProKlim) yang ada di Desa Poleonro mampu melaksanakan serangkaian kegiatan adaptasi dan mitigasi serta mengelola kelembagaan organisasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Organisasi, ProKlim



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Asnal Sudirman (E211 15 517), Capacity Development (Study of Climate Village in Poleonro Village Lamuru District, Bone Regency). 114 Pages + 7 Figures + 6 Tables + 31 References + 3 Appendices. Supervised by Dr. Nurdin Nara, M.Si. and Adnan Nasution, S.Sos, M.Si.

This study aims to describe and analyze the capacity development of the “Climate Village” program implementation of Poleonro Village, Lamuru District, Bone Regency.

The study used a qualitative descriptive method that focused on 3 variables of capacity development according to Merilee S. Grindle (1997). These variables are Human Resources Development, Organizational Strengthening, and Institutional Reform.

Findings show that the capacity building strategy of the “Climate Village” Working Group (PokJa ProKlim) ables to support PokJa Proklim to implement a sequence of adaptation activities, mitigate and manage a sustainable organizational institution.

Keywords: Capacity Building, Organization, ProKlim

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASNAL SUDIRMAN

NIM : E211 15 517

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGEMBANGAN KAPASITAS (Studi Program Kampung Iklim di Desa Poleonro Kec. Lamuru Kab. Bone)" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 29 Juli 2021



ASNAL SUDIRMAN

E211 15 517



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : ASNAL SUDIRMAN
NIM : E211 15 517
Program studi : Ilmu Administrasi
Judul : PENGEMBANGAN KAPASITAS (Studi Program
Kampung Iklim di Desa Poleonro Kec. Lamuru Kab.
Bone)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Juli 2021

Pembimbing I

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002

Pembimbing II

Adnan Nasution, S.Sos, M.Si.
NIP 19740707 200501 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asnal Sudirman
NIM : E211 15 517
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : PENGEMBANGAN KAPASITAS (STUDI PROGRAM
KAMPUNG IKLIM DI DESA POLEONRO KECAMATAN
LAMURU KABUPATEN BONE)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 5 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002

Pembimbing II

Adnan Nsution, S.Sos, M.Si.
NIP 19740707 200501 1001

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

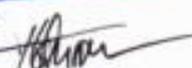
Nama : Asnal Sudirman
NIM : E211 15 517
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : PENGEMBANGAN KAPASITAS (STUDI PROGRAM
KAMPUNG IKLIM DI DESA POLEONRO KECAMATAN
LAMURU KABUPATEN BONE)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 5 Agustus 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Nurdin Nara, M.Si.
Sekertaris : Adnan Nasution, S.Sos, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos, M.A.P
2. Dr. Badu Ahmad, M.Si.

()
()
()
()

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi **Allah SWT**, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas hasanuddin, Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada **Muhammad SAW**, sang idola terbaik sepanjang zaman.

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, bapak tercinta **Sudirman, S.Pd, MM** dan ibunda **Rosnani, S.Pd** beserta saudara-saudara saya. Sembah sujud penulis untuk kalian, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis, kasih sayang yang tiada tara dalam merawat, mendidik, dan mendoakan tiada henti serta selalu memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis. Terima kasih atas perjuangan dan pergoban selama ini, semoga bapak dan ibu tercinta senantiasa dilindungi dan di Rahmati oleh **Allah SWT**.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku pembimbing I yang meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
4. Adnan Nasution, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II sekaligus penasihat akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan. Semoga penulis dapat memanfaatkan dan menjalankan ilmu yang telah di berikan dengan sebaik mungkin.
6. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma dan Pak Lili) dan Staf di Lingkup FISIP UNHAS yang telah memberikan pelayanannya tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.

7. Terimakasih kepada Bapak A. Syahrul Samsu, S.E, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya yang telah mengarahkan dan mengkoordinasikan saya dengan Kepala Desa Poleonro dalam melakukan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada Bapak Hardi, S.Sos selaku Kepala Desa Poleonro beserta jajarannya, Ibu Erniati (Ketua Pokja Proklam Dusun Wanuwae), Ibu Andi Tenri (Ketua Pokja Proklam Dusun Lita), Bapak Andi Ikkal (Ketua Pokja Proklam Dusun Polewali) yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk di wawancarai.
9. Hormat khusus kepada Guru sekaligus Orang Tua saya, Abang Nevy James yang telah banyak memberikan nasihat dan ilmunya agar saya senantiasa menjadi pribadi yang baik dalam menjalani kehidupan ini serta. Semoga kesehatan dan keselamatan tetap menyertainya.
10. Hormat khusus kepada Bunda Acha dan Abang Ippang selaku pendiri UKMPA KOMPAS FISIP UNHAS yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi saya nasihat, pengalaman dan ilmunya agar saya lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar UKMPA KOMPAS FISIP UNHAS, berkatnya saya dapat bertemu dengan banyak manusia, belajar banyak ilmu, melewati banyak pengalaman selama menjadi mahasiswa.
12. Terimakasih kepada Teman – Teman Maros Adventure Rock Climbing Institute, berkatnya saya banyak mencoba hal-hal baru dalam panjat tebing.

13. Terimakasih Kepada Humanis Fisip Unhas, Berkatnya saya bisa mempelajari banyak ilmu dan pengalaman serta bertemu dengan orang – orang baru selama menjadi mahasiswa serta.
14. Terimakasih kepada LAMBE TURAH (Boka, Agung, Ardi, Fahrul, Allu, Ijal, Wahyu, Ade, Al, Faqih, Nopo, Aco, Hamka, dan Aldy) yang telah menemani, membantu dan memberi dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
15. Terimakasih kepada teman, sahabat dan saudara selama menjadi mahasiswa CHAMPION 15 yang tidak bisa saya tuliskan namanya satu persatu atas segala bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan. Semoga kesuksesan untuk kalian semua dan bisa di pertemukan kembali jika saatnya tiba.
16. Terimakasih angkatan yang ada di Humanis Fisip Unhas CIA 09, PRASASTI 10, BRILLIAN 11, RELASI 12, RECORD 13, UNION 14, FRAME 16, LEADER 17, LENTERA 18, MIRACLE 19, PENA 2020 yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman selama masih menjadi mahasiswa.
17. Terimakasih banyak untuk EIGHT BRO (Figar, Ipal, Andy, Kurni, Alif, Aswar, Ridwan) yang telah banyak meluangkan waktunya dalam berbagi pengalaman, cerita sukaduka selama ini. Semoga kesehatan, keselamatan dan kesuksesan setia menemanimu dalam hidup ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja

maupun tidak. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Makassar, 1 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1. Latar Belakang | 1 |
| I.2. Rumusan Masalah | 9 |
| I.3. Tujuan Penelitian | 9 |
| I.4. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| II.1. Pengertian Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)..... | 11 |
| II.1.1. Tujuan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)..... | 15 |
| II.1.2. Dimensi dan Tingkatan Pengembangan Kapasitas (Capacity Bulding)..... | 16 |
| II.1.3. Faktor yang mempengaruhi Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)..... | 18 |
| II.2. Pengertian Pelaksanaan Program..... | 21 |
| II.3. Program Kampung Iklim (ProKlim) | 22 |
| II.3.1. Pengertian Program Kampung Iklim | 23 |
| II.3.2. Bentuk Kegiatan Program Kampung Iklim..... | 23 |
| II.3.3. Tahapan Kegiatan Program Kampung Iklim..... | 24 |
| II.4. Kerangka Berfikir..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| III.1. Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| III.2. Lokasi Penelitian | 32 |
| III.3. Fokus Penelitian..... | 33 |
| III.4. Informan..... | 36 |
| III.5. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| III.6. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| III.7. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 40 |
| IV.1 Desa Poleonro | 40 |
| IV.1.1 Kondisi Geografis | 41 |
| IV.1.2 Kondisi Demografis | 42 |
| IV.2 Pokja Proklam Dusun Wanuwae..... | 42 |
| IV.2.1 Kegiatan Adaptasi Pokja Proklam Dusun Wanuwae..... | 44 |
| IV.2.2 Kegiatan Mitigasi Pokja Proklam Dusun Wanuwae | 47 |
| IV.3 Pokja Proklam Dusun Lita | 48 |
| IV.3.1 Kegiatan Adaptasi Pokja Proklam Dusun Lita | 49 |
| IV.3.2 Kegiatan Mitigasi Pokja Proklam Dusun Lita..... | 51 |
| IV.4 Pokja Proklam Dusun Polewali..... | 53 |
| IV.4.1 Kegiatan Adaptasi Pokja Proklam Dusun Polewali..... | 55 |
| IV.4.2 Kegiatan Mitigasi Pokja Proklam Dusun Polewali..... | 57 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN | 59 |
| V.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian | 59 |
| V.1.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (Development of the human resources) | 59 |
| V.1.2. Penguatan Organisasi (strengthening organization) | 70 |
| V.1.3 Reformasi Kelembagaan (refotmation of institusions)..... | 84 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB VI PENUTUP | 91 |
| VI.1 Kesimpulan | 91 |
| VI.2 Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.1 Rangkaian Pelaksanaan Program Kampung Iklim..... | 29 |
| Gambar II.2 Kerangka Berfikir..... | 31 |
| Gambar III.1 Teknik Analisis Data Interaktif Model Miles & Huberman..... | 39 |
| Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Poleonro..... | 41 |
| Gambar IV.2: Struktur Organisasi Pokja ProKlim Dusun Wanuwae | 43 |
| Gambar IV.3: Gambar Struktur Organisasi Pokja ProKlim Dusun Lita | 49 |
| Gambar IV.4: Gambar Struktur Organisasi Pokja ProKlim Dusun Polewali | 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel II.1 <i>Dimensions, Focus and Types of Activities of Capacity Building Initiatives</i> | 18 |
| Tabel IV.1: Kegiatan Adaptasi Pokja ProKlim Dusun Wanuwae..... | 44 |
| Tabel IV.2: Kegiatan Mitigasi Pokja ProKlim Dusun Wanuwae | 47 |
| Tabel IV.3: Kegiatan Adaptasi Pokja ProKlim Dusun Lita..... | 49 |
| Tabel IV.4: Kegiatan Mitigasi Pokja ProKlim Dusun Lita | 51 |
| Tabel IV.5: Kegiatan Adaptasi Pokja ProKlim Dusun Polewali | 55 |
| Tabel IV.6: Kegiatan Mitigasi Pokja ProKlim Dusun Polewali | 57 |
| Tabel V.1: Hasil Pengembangan Sumberdaya Manusia | 68 |
| Tabel V.2: Hasil Penguatan Organisasi | 82 |
| Tabel V.3: Hasil Reformasi Kelembagaan..... | 89 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Iklm sejatinya menjadi basis utama yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, ketergantungan manusia terhadap kondisi iklim suatu wilayah turut menjadi faktor penentu dalam menjalani sebuah kehidupan. Iklim merupakan kecenderungan kondisi cuaca pada wilayah tertentu dalam kurun waktu yang lama. Biasanya, perbedaaan iklim yang ada pada suatu daerah dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi air laut

Perbedaan iklim dalam suatu daerah sangat berpengaruh bagi perbedaan pola hidup, mata pencaharian dan kebiasaan. Pada bidang pertanian misalnya, mereka memanfaatkan iklim untuk menentukan waktu menanam dan jenis tanaman yang sesuai, hal ini tentu berbeda di bidang transportasi seperti kapal atau pesawat yang harus mempertimbangkan angin dan hujan atau gelombang tinggi sebelum melakukan sebuah perjalanan.

Perbedaan peran iklim dalam *multisector* seperti, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, transportasi dan telekomunikasi adalah bukti nyata pentingnya iklim. Bagaimana jadinya jika hal ini berubah, tentu pola kehidupan juga pasti berubah bahkan terhenti sekalipun. Persoalan perubahan iklim sudah menjadi isu global sejak di tandatanganinya Perjanjian Paris dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada tahun 2016. Menurut laporan dari (*Intergovernmental Panel on Climate Cahange/IPCC*) Pada tahun 2016, emisi global mencapai sekitar 52 GtCO₂e dan diproyeksikan bisa mencapai 52-58

GtCO₂e pada tahun 2030. Untuk membatasi kenaikan suhu di tingkat 1,5°C (tanpa atau sedikit melampaui target), separuh dari total emisi tahunan perlu dikurangi pada tahun 2030 (rata-rata 25-30 GtCO₂e/tahun). Walaupun secara teknis kenaikan suhu di tingkat 1.5°C dapat dengan mudah dihindari, diperlukan perubahan perilaku dan teknologi secara menyeluruh untuk mencapai pengurangan emisi tersebut.

Efek GRK (Gas Rumah Kaca), pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan CFC yang tidak terkontrol serta limbah buangan industri merupakan faktor penyebab perubahan iklim secara global, hal ini berakar dari meningkatnya jumlah populasi manusia yang terjadi pada setiap tahunnya yang secara otomatis ikut meningkatkan taraf hidupnya.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung atau pun tidak sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang dapat diamati pada kurun waktu yang dapat di bandingkan.

Dampak dari perubahan iklim sudah pasti identik dengan bencana alam. Di Indonesia, bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim serta abrasi menjadi dampak dari perubahan iklim tersebut. Bencana alam terkait *hidrometeorologi* atau kondisi cuaca dan iklim menjadi penyumbang terbesar di bandingkan dengan bencana *geologi* dan *vulkanologi*, hal ini berdasarkan paparan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020, terdapat : jumlah kejadian

banjir telah terjadi sebanyak 1.065, puting beliung 837, tanah longsor 572, kebakaran hutan 326, gelombang pasang dan abrasi 36, serta kekeringan 29. Sedangkan untuk bencana *geologi* dan *vulkanologi* bencana terkait gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 dan erupsi gunung berapi sebanyak 7 kali.

Upaya dalam mengatasi laju perubahan iklim di Indonesia telah direspon oleh pemerintah dengan mengamankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap persoalan perubahan iklim yang termuat dalam Undang – Undang RI No.32 tahun 2009.

Disisi lain prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* dengan visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi landasan utama dalam tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan” (Faedlulloh et al., 2019)

Masyarakat yang secara langsung mengalami dampak dari perubahan iklim sudah sepatutnya di ikut sertakan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hai ini sebagaimana termaktub dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu :

- Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pada era (*Good Governance*) tata kelola pemerintahan yang baik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana UNDP (*United Nations Development Programme*) menentukan karakteristik dari *good governance* yaitu : partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik (Susila Wibawa, 2019)

Melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim telah menjadi sebuah jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat

ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

Dalam pelaksanaannya, program ini menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Dengan pola pendekatan tersebut para pemangku kepentingan diharapkan berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial pada tingkat lokal maupun nasional. Pengembangan dan pelaksanaan Program Kampung Iklim mencakup skala wilayah pada minimal setingkat Dusun/Rukun Warga dan Maksimal setingkat Desa/Kelurahan yang kemudian membentuk sebuah organisasi tersendiri sebagai pelaksana dari program ini.

Partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan sebuah kegiatan menjadi tolak ukur keberhasilan dari program ini. Hal ini di karenakan dasar dari program ini ialah *bottom-up*, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak hanya dijalankan begitu saja oleh masyarakat tetapi mampu memperoleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengendalian perubahan iklim (Faedlulloh et al., 2019)

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, telah terdaftar sebanyak 2.775 lokasi kampung iklim

pada tingkat RT/RW/Desa/Kelurahan yang tersebar di 33 provinsi yang ada di Indonesia dilihat pada jumlah lokasi yang diregistrasi melalui Sistem Registrasi Nasional (SRN), naik hampir 4 kali lipat di dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 220 menjadi 813 lokasi.

Kabupaten Bone mencatat telah memiliki sekitar 30an (Sembilan) Desa yang melaksanakan program ini menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dan salah satunya ialah Desa Poleonro. Desa Poleonro telah menjalankan Program Kampung Iklim sejak Tahun 2015, Desa ini merupakan satu-satunya dari sekitar 30an Desa di Kabupaten Bone yang mendapatkan penghargaan Program Kampung Iklim Utama dan Lestari yang diwakili oleh ketiga dusunnya yakni Dusun Polewali, Dusun Wanuwae dan Dusun Lita. Sejak mendapatkan penghargaan tahun 2017 desa Poleonro terus mengembangkan sayapnya sebagai pelopor dalam mengatasi perubahan iklim, hal ini dibuktikan langsung mencatat rekor penerima penghargaan Program Kampung Iklim empat tahun berturut – turut yang dimulai pada tahun 2017 - 2020.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah didapatkan, Desa Poleonro tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar terlibat secara terus menerus dalam Program Kampung Iklim ini dengan membuat beberapa regulasi yang terkait dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim salah satunya Keputusan Kepala Desa Poleonro Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Gerakan Menanam Pohon dan Penghijauan.

Selain itu, pemberian kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengenai pelaksanaan Program Kampung Iklim langsung tanggap dengan diterbitkannya regulasi berupa Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 147 Tahun 2020 Tentang Pembentukan TIM Pembinaan Program Kampung Iklim Terhadap Dampak Perubahan Iklim Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020. Terbitnya regulasi ini

tentunya menjadi pengutan secara regulasi bagi Desa Poleonro untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kelembagaan Pokja ProKlim yang ada.

Pengembangan kapasitas menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kelembagaan masyarakat sehingga Pokja ProKlim yang ada di Desa Poleonro tetap ada dan konsisten dalam melaksanakan serangkaian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan kapasitas sebagai: (1) ruang yang tersedia; daya tampung; (2) daya serap; (3) keluaran maksimum; kemampuan memproduksi; (4) kemampuan kapasitor sedangkan menurut (Millen, 2004) kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus – menerus. Pengembangan kapasitas sebagai upaya dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi struktur kelembagaan dan budaya organisasi, memodifikasi mekanisme prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumberdaya manusia, dan merubah sistem nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dalam mensejahterahkan masyarakat (Ilato, 2017).

Pada umumnya, pola pengembangan kapasitas memiliki 3 aspek yakni, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan sistem sebagaimana dinyatakan oleh (Morrison, 2001) bahwa *capacity building* merupakan proses

atau serangkaian aktivitas untuk melakukan suatu perubahan baik dalam individu, kelompok, organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan.

Hasil penelitian sebelumnya oleh (Erin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanro, 2014) dengan judul *Strategi Capacity Building* Pemerintah Desa dalam pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bendosari berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari seluruh elemen yang terlibat dalam pengembangan ekowisata melalui program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya hasil penelitian oleh (Andi Samsu Alam & Ashar Prawitno, 2015) dengan judul *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone* menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas organisasi cukup baik dengan menempuh langkah-langkah untuk mengembangkan kapasitas dari segi pengembangan sumberdaya fisik, kapasitas proses operasional dan kualitas sumberdaya manusia aparatur. Selain itu, dari hasil penelitian lainnya oleh (Dodi Faedlulloh, Bambang Irawan & Retnayu Prasetyanti, 2019) dengan judul *Program Unggulan Kampung Iklim (POKLIM) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* menunjukkan Program Kampung Iklim berjalan dengan baik, namun ada proses pemberdayaan cukup berbeda satu sama lain. Selain itu upaya adaptasi dan mitigasi yang dilaksanakan di Kelurahan Kebon

Kosong dan Kelurahan Jati sama-sama menekankan pentingnya proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengembangan kapasitas sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Poleonro dengan melakukan penelitian yang berjudul “**PENGEMBANGAN KAPASITAS (Studi Program Kampung Iklim di Desa Poleonro, Kec.Lamuru, Kab. Bone)**”

I.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengembangan Kapasitas dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Poleonro?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Poleonro.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan serta informasi sebagai rujukan dalam

pelaksanaan Program Kampung Iklim bagi pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia secara umum dan pemerintah kabupaten Bone secara khusus.

b. Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu administrasi secara umum dan terlebih khusus dalam hal pengembangan kapasitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

Pengertian mengenai pengembangan kapasitas dikemukakan oleh (Morrison, 2001) melihat *capacity building* sebagai suatu proses atau serangkaian aktivitas dalam melakukan perubahan multi-level didalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga tanggap terhadap perubahan lingkungan. Definisi lain yang senada dikemukakan oleh (Brown et al., 2004) yang melihat *capacity building* sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, suatu organisasi atau sistem dalam upaya mencapai tujuan atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menerangkan bahwa pengembangan kapasitas ialah “*process whereby people, organizations and society as a whole unlearn, strengthen, create, adapt and maintain capacity over time.*” Maknanya ialah pengembangan kapasitas sebagai sebuah proses keberlanjutan kapasitas secara terus menerus. Pendapat ini lebih menekankan orientasi kapasitas sebagai penguatan berbagai kemampuan dalam berbuat.

Pada umumnya, garis besar dalam konsep pengembangan kapasitas selalu berada pada wilayah individu, kelompok organisasi dan sistem. Proses yang terus menerus dalam pola pengembangannya, menjadi tanda bahwa pengembangan kapasitas bersifat dinamis yang selalu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Merilee S. Grindle (dalam Soeprapto 2006) menyatakan;

"Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance."

Pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas kinerja pemerintah. Efisiensi dalam hal waktu dan sumberdaya dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan, efektivitas ialah kesesuaian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan dan responsibilitas yaitu bagaimana menghubungkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Milen dalam (Soeprapto, 2006) melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada waktu tertentu.

Pengertian lain mengenai *capacity building* juga dikemukakan oleh Katty Sensions dalam (Soeprapto, 2006) yang memberikan definisi:

"Capacity building usually is understood to mean helping governments, communities and individuals to develop the skills and expertise needed to achieve their goals. Capacity building program, often designed to strengthen participant's abilities to evaluate their policy choices and implement decisions effectively, may include education and training, institutional and legal reforms, as well as scientific, technological and financial assistance".

Pengembangan kapasitas pada umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas seringkali didesain untuk

memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dalam menjalankan keputusan-keputusannya secara efektif. Pengembangan kapasitas bisa meliputi pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, dan juga asistensi finansial, teknologi dan keilmuan.

Sementara itu, (Isaksen, 2002) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai:

- *To develop the knowledge and competence of individual and organisations,*
- *To develop organisations and/ or system organisations, and*
- *To change and strengthen institutional frameworks in the form of formal policies and laws and/or other informal norms which stipulate the limits within which individuals and organizations develop.*

Sejalan dengan konsep pengembangan kapasitas dari Grindle (1997) yang menyatakan pengembangan kapasitas sebagai *"ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainadble"*. Selanjutnya bahkan Grindle menyebutkan pengembangan kapasitas mengacu kepada *"improvement in the ability of public sector organizations"*. Kedua konsep ini sejalan dengan pendapat GTZ (*Deutsche Gesellt Chaft Fur Technice Zusammenrtbert*) dalam Triwidodo yang dikemukakan oleh Nugraha menyebutkan bahwa persoalan pengembangan kapasitas bukan terletak pada instrument apa yang digunakan akan tetapi lebih mengacu kepada kemampuan individu secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan memecahkan masalah.

Keseluruhan definisi diatas, pada dasarnya memiliki kesamaan pada 4 (empat) aspek yaitu: (a) bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses atau strategi, (b) proses tersebut berfokus pada peningkatan

kemampuan, (c) dilaksanakan pada tingkatan individu, kelompok, organisasi dan sistem, serta (d) bertujuan untuk merespon terhadap perubahan lingkungan.

Konsep *capacity building* telah menjadi bagian pembahasan dalam lembaga internasional; United Nations memberikan rujukan pengembangan kapasitas yang berdimesikan pada; 1) Mandat dan struktur legal, 2) Struktur kelembagaan, 3) Pendekatan manajerial, 4) Kemampuan organisasional dan teknis, 4) Kemampuan fisik lokal, dan 5) Aktivitas-aktivitas program. Lebih lanjut World Bank menekankan perhatian *capacity building* pada;

- a) Pengembangan sumber daya manusia; training, recruitment dan pemutusan pegawai professional, manajerial dan teknis,
- b) Keorganisasian; pengaturan struktur, proses, sumberdaya dan gaya manajemen,
- c) Jaringan kerja; berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal,
- d) Lingkungan organisasi; berupa aturan dan undang-undang yang mengatur pelayanan public, tanggungjawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi *development tasks*, serta dukungan keuangan dan anggaran,
- e) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Sedangkan UNDP (*United Nations Development Programme*) memfokuskan pada tiga dimensi yaitu;

- 1) Tenaga kerja (*dimensi human resources*), yaitu kualitas Sumberdaya manusia serta cara pemanfaatannya.
- 2) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung,
- 3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen.

Edarlin (dalam Seoprpto, 2006)

II.1.1. Tujuan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

(Morrison, 2001) menjelaskan bahwa tujuan *capacity building* adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi *capacity building* memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik.

Lebih lanjut, Daniel Rickett dalam (Ratnasari, 2013) mengatakan “*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*”. Lebih jauh merumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah;

1. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
3. Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah, daerah dan lainnya.
4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

II.1.2. Dimensi dan Tingkatan Pengembangan Kapasitas (Capacity Bulding)

Penjelasan mengenai tingkatan dalam pengembangan kapasitas dikemukakan oleh (Soeprapto, 2006) yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan:

1. Tingkatan Individu, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang didalam organisasi;
2. Tingkatan organisasi, seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, standar operasional prosedur pekerjaan, sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi;
3. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakn tertentu.

Lebih lanjut, sebagai pakar dibidang pengembangan kapasitas, Merilee S. Grindle (Alam & Prawitno, 2015) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan yaitu:

1. Dimensi pengembangan SDM (*Development of the human resources*), dengan fokus: personel yang profesional dan kemampuanteknis serta tipe kegiatan seperti: pelatihan (*training*), praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan recruitment.
2. Dimensi penguatan organisasi (*Strengthening organization*), dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem intensif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
3. Reformasi kelembagaan (*Reformation of institutions*), dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi birokrasi.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, fokus diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis dengan melakukan kegiatan antara lain pendidikan dan latihan (*training*), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja serta sistem rekrutmen yang tepat. Pada kaitannya dengan penguatan organisasi, fokus diberikan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan mengatur struktur level mikro dengan melakukan kegiatan sistem intensif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi dan struktur manajerial. Kemudian yang berkaitan dengan reformasi kelembagaan, fokus perlu diberikan kepada perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta struktur level makro dengan melakukan

perubahan aturan main dari sistem politik dan ekonomi yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan (Tim Penelitian STIA LAN Makassar, 2012)

Tabel II.1

Dimensions, Focus and Types of Activities of Capacity Building Initiatives

| <i>Dimension</i> | <i>Focus</i> | <i>Types of Activities</i> |
|-------------------------------------|---|---|
| <i>Human Resources Development</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Supply of professional</i> • <i>Technical personnel</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Training</i> • <i>Salaries</i> • <i>Conditions of work</i> • <i>Recruitment</i> |
| <i>Organizational Strengthening</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Management systems to improve performance of specific task and functions</i> • <i>Microstructures</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Managerial structures</i> • <i>Organizational culture</i> • <i>Incentive systems</i> • <i>Leadership</i> • <i>Communications</i> |
| <i>Institution Reform</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Institutions and system</i> • <i>Macrostructures</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rules of the game for economic and political regimes</i> • <i>Policy and legal change</i> • <i>Constituonal reform</i> |

Sumber: Grindle, M.S (1997)

II.1.3. Faktor yang mempengaruhi Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

(Kusmiati, 2016) mengemukakan bahwa terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kapasitas. Secara umum faktor ini dapat dibagi menjadi dua bagaian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: kepemimpinan, komitmen bersama (*collective commitment*), pengakuan terhadap kekuatan dan kelemahan, partisipasi, inovasi dan

akuntabilitas. Sedangkan faktor eksternal meliputi: *networking*, Informasi dan regulasi.

Pertama, Kepemimpinan. Faktor kepemimpinan merupakan hal yang mendasar dalam memberikan pengaruh terhadap pengembangan kapasitas. Organisasi harus terus didorong oleh sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis, hal ini dengan melihat tantangan masa depan yang semakin berat dan juga terbatasnya sumberdaya yang dimiliki oleh sektor publik. Kepemimpinan kondusif mampu memberikan kesempatan yang luas pada komponen organisasi untuk melakukan inisiasi-inisiasi dalam pengembangan kapasitas sebagai bekal dalam pencapaian tujuan.

Kedua, Komitmen bersama (*collective commitment*). Keterlibatan seluruh aktor organisasi dalam mendukung pengembangan kapasitas menjadi sebuah penentu dalam kesuksesannya. Komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus terus ada karena hal ini akan menjadi dasar dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi.

Ketiga, pengakuan terhadap kekuatan dan kelemahan. Pengembangan kapasitas hendaknya dimulai dari mengidentifikasi kapasitas yang dimiliki, maka dari itu semua personal dalam organisasi harus memberikan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Pengakuan ini menjadi penting dalam melaksanakan program pengembangan kapasitas.

Keempat, Partisipasi. Keterlibatan seluruh person dalam organisasi sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program pengembangan kapasitas.

Insiatif yang tinggi dari semua person akan menjadi jaminan sebuah program bisa berkelanjutan.

Kelima, Inovasi. Pengembangan kaspasitas organisasi merupakan salah satu bentuk inovasi. Dinamisnya program ini selalu sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Untuk itu, inovasi merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kapasitas dalam menyediakan berbagai metode alternatif yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan.

Keenam, Transparansi. Kunci penting transparansi dalam pengembangan kapasitas khususnya pada pengendalian pelaksanaan program agar tujuan program dapat sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, transparansi meruapakan aspek yang menjamin program pengembangan kapasitas berjalan secara *legitimate*, *kredibel* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketujuh, Networking. *“Networking is a process of getting together to get ahead. It is a building of mutually beneficial relationship”*. Seringnya program pengembangan kapasitas tidak berjalan sebagaimana mestinya tidak terlepas dari ketidak inginan individu/kelompok menjalin mitra kerjasama. Harus dipahami bahwa proses pengembangan kapasitas harus melepaskan ego organisasi dengan melakukan sebuah kerjasama dengan para *stakeholder* yang dianggap memumpuni.

Kedelapan, Informasi. Pengetahuan mengenai informasi perubahan lingkungan atau perubahan kebutuhan masyarakat sangat berguna bagi organisasi sebagai bahan dalam mendesain program pegembangan kapasitas. Organisasi yang minim informasi tentang perubahan yang ada dilingkungannya

berpengaruh terhadap kualitas dan keberhasilan program pengembangan yang dibuat.

Kesembilan, Regulasi. Pola pikir pimpinan dan kebiasaan pegawai sebuah organisasi yang selalu berlindung pada peraturan serta berbagai faktor *legal-prosedural* dari pemerintah dapat menjadi penghambat dalam keberhasilan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari sebuah implementasi program, reformasi terhadap berbagai regulasi yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai dinamika yang muncul, hal ini merupakan salah satu cara dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kapasitas kelembagaan.

II.2. Pengertian Pelaksanaan Program

Siagian S.P dalam (Dinata, 2015) memberikan pengertian pelaksanaan sebagai usaha- usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Program menurut Tjokroamidjyo dalam (Rahmah, 2014) adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas.

Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Wahab yang dinyatakan oleh (Rahmah, 2014) bahwa program adalah suatu lingkup pemerintah yang relative khusus dan jelas batas - batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legitimasi, pengorganisasian dan pengarahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan program merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk menjalankan perencanaan/rumusan kebijakan secara terorganisir dengan tujuan tertentu.

II.3. Program Kampung Iklim (ProKlim)

Efek dari berbagai peristiwa alam yang merugikan masyarakat terkait dengan perubahan iklim telah mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Banjir, kekeringan, longsor, gelombang tinggi dan permukaan air laut dengan intensitas tinggi telah banyak menimbulkan kerugian, baik dari segi ekonomi, ekologi bahkan sampai korban jiwa.

Upaya dalam menyikapi kondisi tersebut, Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh Presiden dalam mengatasi persoalan perubahan iklim dan efek gas rumah kaca telah meluncurkan Program Kampung Iklim. Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, partisipasi masyarakat yang menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

II.3.1. Pengertian Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. (Peraturan Dirjen Perubahan iklim tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim).

Program ini dilaksanakan di wilayah administratif paling rendah setingkat RW/Dusun dan paling tinggi setingkat Kelurahan atau Desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi iklim secara berkesinambungan.

II.3.2. Bentuk Kegiatan Program Kampung Iklim

Adapun bentuk kegiatan dalam Program Kampung Iklim terbagi menjadi dua bagian, yaitu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

1. Adaptasi

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat

dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Berikut bentuk kegiatan adaptasi perubahan iklim:

- Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
- Peningkatan ketahanan pangan
- Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi
- Pengendalian penyakit terkait iklim

2. Upaya Mitigasi

Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk penanggulangan dampak perubahan iklim.

Berikut bentuk kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim:

- Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
- Penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghemat energy

II.3.3. Tahapan Program Kampung Iklim

Tahapan dalam kegiatan Program Kampung Iklim terdiri atas persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan dan penguatan aksi. Adapun tahapan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persiapan

1.1 Persiapan kelompok kerja

Pembentukan kelompok kerja dapat diambil dari unsur – unsur:

- a. Kelompok masyarakat yang telah menjalankan kegiatan, seperti kelompok tani, pengelola air, sampah, masyarakat peduli API (aksi perubahan iklim), masyarakat Desa konservasi, pencinta alam.
- b. Kelompok masyarakat hukum adat, keagamaan, PKK, organisasi pemuda dan perangkat Desa/Kelurahan/Dusun.

Kelompok kerja ini kemudian disahkan oleh pimpinan wilayah setempat dan kemudian memiliki tugas kerja antara lain:

- a. Membangun kesepahaman antar anggota kelompok kerja.
- b. Mengumpulkan basis data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pengembangan Program Kampung Iklim antara lain:
 - Luas wilayah
 - Jumlah penduduk
 - Sumber penghasilan utama penduduk
 - Elevasi/ ketinggian lokasi dari permukaan laut
 - Curah hujan rata-rata
 - Jenis lokasi
- c. Proaktif dalam berkomunikasi dengan pihak pemerintah dan pendukung
- d. Mengidentifikasi tantangan atau isu yang dihadapi
- e. Memfasilitasi pemecahan masalah serta memantau kemajuan pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.

1.2 Pembuatan Profile Kerentanan dan Emisi GRK (gas rumah kaca).

Tujuan dalam pembuatan profil kerentanan dan emisi GRK pada lokasi yang melaksanakan kampung iklim adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi dan mendialogkan aset penghidupan warga yang ada.
- b. Mengetahui jenis ancaman bencana terkait iklim yang dapat mempengaruhi aset penghidupan warga.
- c. Jenis kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi GRK.

Data profil yang berada pada lokasi dilaksanakannya Program Kampung Iklim setidaknya berisi tentang data dasar, aktivitas harian masyarakat, indikator kerentanan resiko perubahan iklim, kegiatan sumber emisi GRK, peta sumberdaya dan ancaman terkait iklim, sejarah desa dan kebencanaan, kalender musim, sketsa transek serta sketsa kebun dan rumah tangga.

2. Perencanaan

2.1 Perencanaan pengembangan, peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat

Perencanaan terhadap aspek peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dilakukan oleh kelompok kerja melalui:

- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan.
- b. Perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat antara lain: Sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, studi banding, dan mengikuti seminar.

2.2 Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.

Proses penyusunan rencana aksi mengacu pada data dan informasi yang telah terkumpul pada tahap persiapan, termasuk hasil identifikasi kerentanan bencana, resiko iklim dan sumber emisi GRK. Pada proses ini kehadiran narasumber atau ahli diharapkan bisa mendapatkan informasi ataupun berdiskusi terkait data yang dibutuhkan dalam rencana aksi tersebut.

Dalam penyusunannya seluruh hasil kajian dipaparkan kembali, untuk mengingatkan warga/komunitas terhadap jenis dan tingkatan ancaman yang ada, kerentanan maupun kapasitas yang dimiliki. Setelah pemaparan warga/komunitas kemudian berdiskusi dan merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin di capai dalam menangani ancaman perubahan iklim.

3. Pelaksanaan

3.1 Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.

Setelah dokumen perencanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersusun, selanjutnya adalah menyepakati rencana tindak lanjut untuk implementasi aksi. Persiapan yang perlu dilakukan yaitu berdiskusi dengan pihak pendukung dan penentuan jadwal pelaksanaan skala prioritas.

Priortitas program dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara umum dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Penetapan prioritas lokasi sasaran pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi.
- b. Penetapan prioritas bentuk aksi adaptasi perubahan iklim.

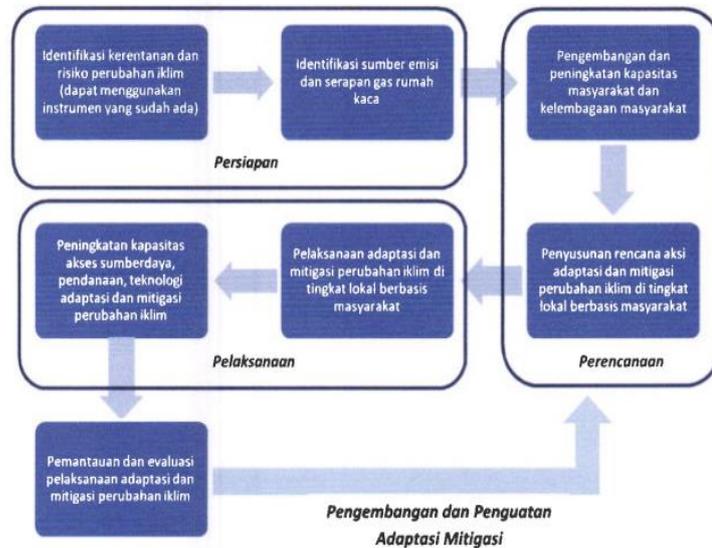
c. Penetapan jangka waktu pelaksanaan langkah aksi adaptasi dan mitigasi.

3.2 Peningkatan kapasitas akses sumberdaya, pendanaan, serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam konteks pelaksanaan Program Kampung Iklim, masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya dalam mengakses sumberdaya, pendanaan, serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Akses sumberdaya yang dimaksud meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial. Akses sumberdaya pendanaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, swadaya atau sumber keuangan lain yang tidak mengikat. Teknologi menyangkut pengetahuan, dan dukungan sarana prasarana.

4. Pengembangan dan Penguatan Program Kampung Iklim.

Pengembangan dan penguatan Program Kampung Iklim dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala oleh pelaksana Program Kampung Iklim. Pemantauan dan evaluasi dengan mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan adaptasi, mitigasi, serta kelembagaan dan dukungan keberlanjutan.



Gambar II.1

Rangkaian Pelaksanaan Program Kampung Iklim

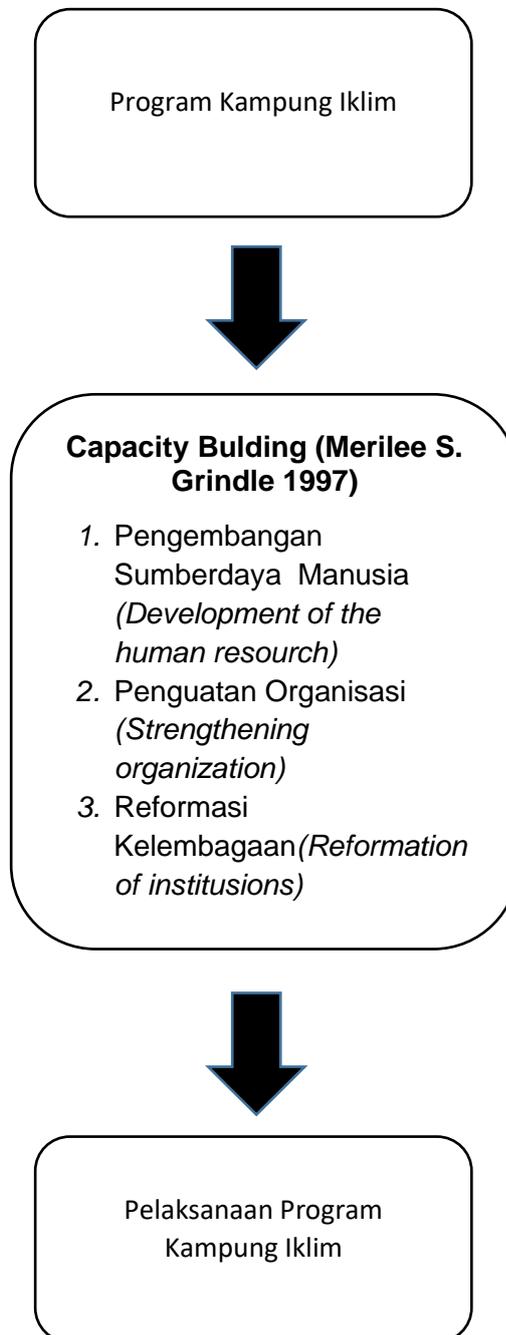
II.4. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan pengembangan kapasitas pada Program Kampung Iklim Desa Poleonro yang terdiri dari 3 (tiga) variabel :

1. Pengembangan kapasitas pada level pengembangan sumber daya manusia (*Development of the human resources*) yang berfokus kepada keprofesionalan dan kemampuan teknis masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kelompok Program Kampung Iklim dengan indikator :
 - a) Pelatihan (*training*),
 - b) Gaji (*Salaries*),
 - c) Kondisi kerja (*Conditions or work*),

- d) Perekrutan (*Recruitment*).
2. Penguatan organisasi (*Strengthening organization*) yang fokus pada tata manajemen organisasi untuk meningkatkan keberhasilan masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melaksanakan Program Kampung Iklim dengan indikator:
- a) Sistem intensif (*Incentive systems*),
 - b) Permanfaatan personel (*Utilization of personal*),
 - c) Kepemimpinan (*Leadership*),
 - d) Budaya organisasi (*Organisational culture*),
 - e) Komunikasi (*Communications*),
 - f) Struktur manajerial (*Managerial structures*).
3. Reformasi kelembagaan (*Reformation of institutions*) yang fokus pada kelembagaan dan sistem serta makro struktur untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim di Desa Poleonro dengan indikator:
- a) Aturan main untuk ekonomi dan rezim politik (*Rules of the game for economic and political regimes*),
 - b) Perubahan kebijakan dan regulasi (*Policy and legal change*),
 - c) Reformasi konstitusi (*Constitutional reform*).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.2
Kerangka Berfikir